

RINGKASAN

Sahrul Muarif Hsb
NIM: 21050068

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Gas Bersubsidi
(Studi Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst)
(Romi Asmara, S.H., M.Hum & Muammar, S.H., M.H)

Pengaturan hukum tentang izin usaha minyak dan gas bumi tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah dan mengatur tata kelola Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Gas Bersubsidi. Pengoplosan gas bersubsidi merupakan salah satu jenis tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 55 Undang-Undang Migas telah di ubah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, serta analisis putusan hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan dasar pertimbangan Hakim terhadap pelaku penyalahgunaan gas bersubsidi. Manfaat penelitian ini secara teoritis menambah khasanah dibidang hukum terutama hukum pidana. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep *Ratio Decidendi* secara lebih logis, kritis dan sistematis sebagai masukan bagi praktisi hukum terutama dalam pengambilan kebijakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terhadap sanksi penyalahgunaan gas bersubsidi yang dilakukan oleh individu telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, Hakim menimbang bahwa dalam putusan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana tersebut Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepada terdakwa dibebankan juga membayar biaya perkara. Pertimbangan Hakim juga telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang dituntutkan yaitu unsur turut membantu.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya mempertimbangkan putusan didasarkan atas penerapan hukum materil dan formil lebih tepat diterapkan kepada pelaku supaya memberikan kesadaran kepada pelaku sendiri serta oknum. Dan juga harusnya memperhatikan alasan pelaku tersebut guna untuk memberikan keadilan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Gas Bersubsidi, Penyalahgunaan.

SUMMARY

Sahrul Muarif Hsb
NIM: 21050068

Legal Analysis of Criminal Offenses Related to the Abuse of Subsidized Gas (Study of Decision Number: 552/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst)

(Romi Asmara, S.H., M.Hum & Muammar, S.H., M.H)

The legal regulation regarding business licenses for oil and gas is outlined in Article 23 Paragraph (1) of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, which states that downstream business activities can be carried out by business entities after obtaining a business license from the government and regulates the oversight of the provision and distribution of subsidized gas. The mixing of subsidized gas is one type of criminal act of misusing subsidized gas as stipulated in Article 55 of the Oil and Gas Law, which has been amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation.

The research method used is normative juridical, with a legislative approach, data collection conducted through literature study, and analysis of court decisions. The purpose of this research is to understand the accountability and the basis for the Judge's considerations regarding the perpetrators of subsidized gas abuse. The theoretical benefit of this research is to enrich the field of law, especially criminal law. Practically, this research is expected to develop the concept of Ratio Decidendi in a more logical, critical, and systematic way as input for legal practitioners, especially in policy-making.

The results of this study indicate that the regulation of sanctions for the abuse of subsidized gas by individuals has met the elements of criminal responsibility. The judge considered that in the verdict, the defendant was proven guilty of committing the crime, and the panel of judges also found no circumstances that could negate criminal responsibility, either as a justification or as an excuse. Therefore, the defendant is a person who is capable and can be held accountable under the law. Since the defendant has been declared guilty and sentenced, the defendant is also required to pay case costs. The judge's considerations have also fulfilled all elements of the charged article, which includes the element of aiding.

Judges in deciding cases should consider that the verdict is based on the application of substantive and formal law that is more appropriately applied to the perpetrators to provide a deterrent effect both to the perpetrators themselves and to others. Additionally, they should take into account the reasons of the perpetrators in order to provide justice to the criminal offenders who engage in such activities.

Keywords: Criminal Accountability, Subsidized Gas, Abuse.